



RENCANA KERJA TAHUNAN STASIUN KIPM TERNATE

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM Ternate) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” maka Stasiun KIPM Ternate menetapkan misi yaitu :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan penerapan praktik yang baik disetiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun KIPM Ternate Tahun 2025, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2025. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Ternate untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2025 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Stasiun KIPM Ternate sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2025. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun KIPM Ternate di tahun kedepannya.

Demikian RKT Stasiun KIPM Ternate Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Ternate, 31 Januari 2025
Kepala Stasiun KIPM Ternate,

Arsal, S.St.Pi., M.P

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BKIPM 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Ternate 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Perpres No. 02 Tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan BKIPM menjadi Perpres No. 38 Tahun 2023 dalam Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui *quality assurance*, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu

lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Stasiun KIPM Ternate sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Stasiun KIPM Ternate cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Stasiun KIPM Ternate Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2025.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Stasiun KIPM Ternate pada tahun 2025.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Ternate dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2025. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2025.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun KIPM Ternate adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Ternate Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun KIPM Ternate tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BKIPM Tahun Anggaran 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Ternate pada tahun 2025.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.

3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem

pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui:

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,
- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: “Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BPPMHKP tahun 2025 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program- program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan- kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupan fungsinya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan,

penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;

6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam

- negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP
 5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
 6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
 7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
 8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Stasiun KIPM Ternate telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional,

menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Stasiun KIPM Ternate telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Stasiun KIPM Ternate TA 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		4.	Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	75
		5.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	98
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan	6.	Persentase implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70

	perikanan yang konsisten sesuai standar	7.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai indeks)	3,36
SK.3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai indeks)	84
		9.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	82
		10.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	100
		11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	93,76
		12.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	82
		13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)	80
		14.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)	80

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Ternate Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun KIPM Ternate TA 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	99

SK.2	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75
		5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	88

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT. Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standard dan perkembangan iptek.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja Stasiun KIPM Temate tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil

perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Stasiun KIPM Ternate tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 2,684,228,000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Ternate untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refocusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada Dukungan Manajemen, Manajemen Mutu dan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Ternate Ternate Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.334.228.000,-
2.	Manajemen Mutu	145.000.000,-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	205.000.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Ternate Tahun 2025		2.684.228.000,-

Rencana kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Stasiun KIPM Ternate antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

***RENCANA KERJA TAHUNAN STASIUN KIPM TERNATE
T.A. 2025***

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan BKIPM Ternate pada tahun 2025 sebesar **Rp. 2,684,228,000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Hasil kelautan dan Perikanan Sebesar **Rp. 5.937.937.000,-**
2. Manajemen Mutu sebesar **Rp. 175.000.000,-**
3. **Pengendalian** dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp. 225.000.000,-**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN TERNATE**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Arsal**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Ternate



Ditandatangani
Secara Elektronik

Arsal

*RENCANA KERJA TAHUNAN STASIUN KIPM TERNATE
T.A. 2025*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN TERNATE

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75
		5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.334.228.000,-
2.	Manajemen Mutu	145.000.000,-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	205.000.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Ternate Tahun 2025		2.684.228.000,-

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Ternate



Ditandatangani
Secara Elektronik

Arsal

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649767)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 2,684,228,000	

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			350,000,000	
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			205,000,000	
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	20.0 produk, Sertifikat		90,000,000	
	Lokasi : KOTA TERNATE				
3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	20.0 produk		90,000,000	
051	Validasi produk pada sektor produksi pasca panen			90,000,000	U
A	Inspeksi/Surveilan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)			30,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30,000,000	A
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara) [2 Orang x 3 Hari x 7 Lok]	42.0 OH	430,000	18,060,000	*
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (MALUKU UTARA) [2 Orang x 1 Hari x 7 Lok]	14.0 OH	300,000	4,200,000	*
	- Transportasi Perjalanan Dinas				
	- Inspeksi/Verifikasi/Surveilan SPDI di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 7 kali]	14.0 OK	552,860	7,740,000	*
B	Inspeksi dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)			14,094,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			14,094,000	
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Transportasi Perjalanan Inspeksi/Verifikasi/Surveilan SKP di Wilayah Maluku Utara [2 Org x 4 kali]	8.0 OK	601,750	4,814,000	
	- Uang Harian Perjalanan nspeksi/Verifikasi/Surveilan SKP di Wilayah Maluku Utara [2 Orang x 2 Hari x 4 kali]	16.0 OK	430,000	6,880,000	
	- Penginapan Perjalanan Dinas				
	- Inspeksi/Verifikasi/Surveilan SKP di Wilayah Maluku Utara [2 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	8.0 OK	300,000	2,400,000	
C	Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)			30,136,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30,136,000	
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara) [2 Orang x 3 Hari x 7 Lok]	42.0 OH	430,000	18,060,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (MALUKU UTARA) [2 Orang x 1 Hari x 7 Lok]	14.0 OH	300,000	4,200,000	
	- Transportasi Perjalanan Dinas Inspeksi/Surveilan HACCP Maluku Utara [2 Org x 7 kali]	14.0 OK	562,620	7,876,000	
D	Pelatihan HACCP Dasar dan Noreg Inspektur Mutu			15,770,000	
					RM
					RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649767)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 2,684,228,000	

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate) - Transportasi HACCP Dasar (Yogyakarta) [1 Orang x 1 kali] - Transportasi Noreg Inspektur Mutu (Semarang) [1 Orang x 1 kali] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TENGAH) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) - Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.I. Yogyakarta) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) - Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (Jawa Tengah)			15,770,000	RM
3989.PDF	<u>Sertifikasi Lembaga[Base Line]</u>	10.0 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat		100,000,000	
3989.PDF.002	Lokasi : KOTA TERNATE Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	10.0 Lembaga		100,000,000	
051	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			100,000,000	U
A	<i>Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan</i>			35,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara) Inspeksi CBIB [3 Org x 3 hari x 2 Lok x 2 Kali] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (MALUKU UTARA) [3 Org x 1 Hari x 2 Lok x 2 Kali] - Transportasi Perjalanan Dinas Inspeksi CBIB [3 Org x 2 Lok x 2 Kali]	36.0 OH 12.0 OH 12.0 OK	430,000 654,000 972,700	15,480,000 7,848,000 11,672,000	* * *
B	<i>Sertifikasi CPIB pada Pembenihan</i>			5,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara) [2 Org x 2 Hari x 1 Lok] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (MALUKU UTARA) [2 Org x 1 hari] - Transportasi Perjalanan CPIB pada Pembenihan Halmahera Utara [2 Org x 1 kali x 1 Lok]	4.0 OH 2.0 OH 2.0 OK	430,000 654,000 986,000	1,720,000 1,308,000 1,972,000	
C	<i>Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan</i>			50,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.062-Ternate) - ATK - Komputer Supplies	1.0 PKT 1.0 PKT	500,000 1,164,000	500,000 1,164,000	* *

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,684,228,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (MALUKU UTARA) [3 Org x 2 Hari x 4 Lok] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara) [3 Org x 4 Hr x 4 Lok] - Transportasi Perjalanan Dinas Inspeksi CPIB Kapal [3 Org x 1 kali x 4 Lok]	24.0 OH 48.0 OH 12.0 OK	654,000 430,000 1,000,000	48,336,000 15,696,000 20,640,000 12,000,000	A * * *	PNP
D	Bimtek TOT Pusat			10,000,000		
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.062-Ternate) - Transportasi TOT Pusat Pengendalian dan Pengawasan Primer [1 Orang x 1 kali] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) - Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.K.I. Jakarta)	1.0 OK 2.0 OH 2.0 OH 2.0 OH	7,160,000 730,000 530,000 160,000	7,160,000 1,460,000 1,060,000 320,000		RM
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	6.0 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		15,000,000		
3989.QIC.002	Lokasi : KOTA TERNATE UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.0 Lembaga		15,000,000		
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			15,000,000	U	
A	Evaluasi Kesesuaian Penerbitan HC UPI Ekspor			7,100,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate) - Transportasi Perjadin Evaluasi Kesesuaian Penerbitan HC UPI Ekspor [1 Orang x 4 kali] - Uang Harian Perjadin Evaluasi Kesesuaian Penerbitan HC UPI Ekspor [1 orang x 2 hari x 4 kali] - Penginapan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan HC UPI Ekspor [1 Orang x 1 hari x 4 kali]	4.0 OK 8.0 OK 4.0 OK	615,000 430,000 300,000	7,100,000 2,460,000 3,440,000 1,200,000	A * * *	PNP
B	Temu Teknis Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Bogor)			7,900,000		
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.062-Ternate) - Transportasi Temu Teknis Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan [1 Orang x 1 kali] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) - Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (Jawa Barat)	1.0 OK 2.0 OH 2.0 OH 2.0 OH	6,000,000 400,000 430,000 130,000	7,900,000 6,000,000 800,000 840,000 260,000	A * * * *	PNP
7010	Manajemen Mutu			145,000,000		
7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		10,000,000		
7010.ABR.001	Lokasi : KOTA TERNATE Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		10,000,000		
051	Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor			10,000,000	U	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,684,228,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Monitoring Evaluasi Negara Mitra			10,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.062-Ternate)			10,000,000	A PNP
	Transportasi Perjadin Monitoring Evaluasi Pemanfaatan				
	- Nomor Registrasi Negara Mitra [2 Orang x 1 kali x 2 Lok]	4.0 OK	760,000	3,040,000	*
	Uang Harian Perjadin Monitoring Evaluasi Pemanfaatan				
	- Nomor Registrasi Negara Mitra [2 Orang x 3 hari x 2 Lok]	12.0 OK	430,000	5,160,000	*
	Penginapan Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Nomor				
	Registrasi Negara Mitra [2 Orang x 1 Hari x 2 Lok]	4.0 OK	450,000	1,800,000	*
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Orang, Kegiatan		10,000,000	
7010.DCC.001	Lokasi : KOTA TERNATE				
051	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.0 Kegiatan		10,000,000	
A	Peningkatan Kometensi Inspektur Mutu			10,000,000	U
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.062-Ternate)			10,000,000	A PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali) [1 Orang x 2 hari]	2.0 OH	480,000	960,000	*
	- Transportasi Ternate-Denpasar PP	1.0 OK	6,344,000	6,344,000	*
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (B A L I)	2.0 OH	1,138,000	2,276,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (Bali) [1 Orang x 3 Hari]	3.0 OH	140,000	420,000	*
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		80,000,000	
7010.PBR.001	Lokasi : KOTA TERNATE				
051	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		80,000,000	
A	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			80,000,000	U
522191	Surveilans SNI ISO/IEC 17025 2017			80,000,000	
524111	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.062-Ternate)			56,780,000	RM
	- Blaya keanggotaan KAN	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
	- Uji Profisiensi	3.0 PKT	1,500,000	4,500,000	
	- Blaya Asessmen 17025	2.0 PKT	3,500,000	7,000,000	
	- Kalibrasi Alat Laboratorium	1.0 PKT	41,780,000	41,780,000	
	- Biaya Uji Banding	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			23,220,000	RM
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara) [2 Orang x 3 Hari]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (MALUKU UTARA) [2 Orang x 2 Hari]	4.0 OH	1,160,000	4,640,000	
	- Transportasi Asessor Jakarta-Ternate PP [2 Orang x 1 Kali]	2.0 OK	8,000,000	16,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,684,228,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]	2.0 Lembaga, Unit Kerja		35,000,000	
	Lokasi : KOTA TERNATE				
7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.0 Lembaga		25,000,000	
051	Penerapan Standar Metode Pengujian			25,000,000	U
A	Sertifikasi Sistem manajemen Mutu ISO 9001			25,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			25,000,000	2 PNP
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Biaya Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1.0 PKT	25,000,000	25,000,000	*
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		10,000,000	
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			10,000,000	U
A	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi SNI ISO/IEC 17020			10,000,000	
521211	Belanja Bahan			3,000,000	RM
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Belanja Bahan Inspeksi	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			7,000,000	RM
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Kalibrasi Alat Inspeksi	1.0 PKT	5,500,000	5,500,000	
	- Iuran Tahunan	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		10,000,000	
	Lokasi : KOTA TERNATE				
7010.QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	1.0 Produk		10,000,000	
051	Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance			10,000,000	U
A	Rapat Koordinasi Quality Assurance			10,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			10,000,000	A PNP
	(KPPN.062-Ternate)				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali) [1 Orang x 2 hari]	2.0 OH	480,000	960,000	*
	- Transportasi Ternate-Denpasar PP	1.0 OK	6,344,000	6,344,000	*
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (B A L I)	2.0 OH	1,138,000	2,276,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (Bali) [1 Orang x 3 Hari]	3.0 OH	140,000	420,000	*
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			2,334,228,000	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			2,334,228,000	
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	19.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		2,238,648,000	
	Lokasi : KOTA TERNATE				
3987.EBA.962	Layanan Umum	6.0 Layanan		125,580,000	
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			125,580,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,684,228,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Pengelolaan Rumah Tangga</i>			17,080,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate)			17,080,000	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1 Orang x 2 Hari x 2 kali]	4.0 OH	530,000	2,120,000	
	- Transportasi Sinkronisasi Data Sakti [1 Orang x 2 Kali]	2.0 OK	6,000,000	12,000,000	
	- Penginapan Kegiatan Sinkronisasi Data Sakti [1 Orang x 2 Hari x 2 Kali]	4.0 OH	500,000	2,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.K.I. Jakarta) [1 Orang x 3 Hari x 2 Kali]	6.0 OH	160,000	960,000	
B	<i>Pengelolaan Umum</i>			40,045,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.062-Ternate)			3,885,000	RM
	- Snack Pelayanan	1.0 PKT	1,885,000	1,885,000	
	- Cetak Sarana Data dan Informasi booklet/banner/spanduk dll	1.0 Paket	2,000,000	2,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.062-Ternate)			2,000,000	RM
	- Member layanan aplikasi editing/olah data dan informasi	2.0 paket	1,000,000	2,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate)			34,160,000	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1 Orang x 2 Hari x 2 kali]	4.0 OH	530,000	2,120,000	
	- Transportasi Bimtek Kepegawaian [1 Orang x 2 Kali]	2.0 OK	6,000,000	12,000,000	
	- Penginapan Kegiatan Bimtek Kepegawaian [1 Orang x 2 Hari x 2 Kali]	4.0 OH	500,000	2,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.K.I. Jakarta) [1 Orang x 3 Hari x 2 Kali]	6.0 OH	160,000	960,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1 Orang x 2 Hari x 2 kali]	4.0 OH	530,000	2,120,000	
	- Transportasi Bimtek Data dan Informasi [1 Orang x 2 Kali]	2.0 OK	6,000,000	12,000,000	
	- Penginapan Kegiatan Bimtek Data dan Informasi [1 Orang x 2 Hari x 2 Kali]	4.0 OH	500,000	2,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.K.I. Jakarta) [1 Orang x 3 Hari x 2 Kali]	6.0 OH	160,000	960,000	
D	<i>TATA LAKSANA KELEMBAGAAN</i>			32,730,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate)			32,730,000	RM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [3 org x 3 hari]	9.0 OH	730,000	6,570,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 org x 4 hari]	12.0 OH	530,000	5,160,000	
	- Transportasi Koordinasi Tata Laksana Kelembagaan [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	7,000,000	21,000,000	
F	<i>TATA USAHA DAN KEARSIPAN</i>			35,725,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,684,228,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.062-Ternate) - ATK - Komputer Suplies - ATK - Komputer Suplise	1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	2,000,000 2,000,000 500,000 525,000	5,025,000 2,000,000 2,000,000 500,000 525,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 Orang x 3 Hari] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1 Orang x 4 Hari] - Transportasi Perjadin Layanan Maintenance WBK - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1 Orang x 2 Hari x 2 kali] - Transportasi Bimtek Persuratan dan Arsiparis [1 Orang x 2 Kali] - Penginapan Kegiatan Persuratan dan Arsiparis [1 Orang x 2 Hari x 2 Kali] - Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.K.I. Jakarta) [1 Orang x 3 Hari x 2 Kali]	3.0 OH 4.0 OH 1.0 OK 4.0 OH 2.0 OK 4.0 OH 6.0 OH	730,000 530,000 7,000,000 530,000 6,000,000 500,000 160,000	30,700,000 4,500,000 2,120,000 7,000,000 2,120,000 12,000,000 2,000,000 960,000	RM
3987.EBA.994	<u>Layanan Perkantoran</u>	13.0 Layanan		2,113,068,000	
001	<u>Gaji dan Tunjangan</u>			1,004,917,000	U
A	<u>GAJI DAN TUNJANGAN</u>			893,227,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.062-Ternate) - - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)/THR	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	198,888,000 16,337,000 17,971,000	198,888,000 16,337,000 17,971,000	RM
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.062-Ternate) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - - Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 14)/THR - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 THN	1,000 1,000 11,000	13,000 1,000 1,000 11,000	RM
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.062-Ternate) - - Belanja Tunj. Suamilstri PNS - - Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 14)/THR - - Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 13)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	19,889,000 1,634,000 1,634,000	23,157,000 19,889,000 1,634,000 1,634,000	RM
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.062-Ternate) - - Belanja Tunj. Anak PNS - - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)/THR	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	6,473,000 535,000 535,000	7,543,000 6,473,000 535,000 535,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,684,228,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.062-Ternate) - - Belanja Tunj. Struktural PNS - - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) - - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)/THR	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	6,480,000 540,000 540,000	7,560,000 6,480,000 540,000 540,000	RM
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.062-Ternate) - - Belanja Tunj. Fungsional PNS - - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) - - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)/THR	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	9,000,000 750,000 750,000	10,500,000 9,000,000 750,000 750,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.062-Ternate) - - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	2,676,000	2,676,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.062-Ternate) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	18,249,000	18,249,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.062-Ternate) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	48,312,000	48,312,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.062-Ternate) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS Gaji Ke 13 - Belanja Tunjangan Umum PNS Gaji Ke 14/THR	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	2,160,000 180,000 180,000	2,520,000 2,160,000 180,000 180,000	RM
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.062-Ternate) - Lembur Pegawai	1.0 THN	60,000,000	60,000,000	RM
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.062-Ternate) - Belanja Tunjangan Kinerja PNS	1.0 THN	479,501,000	479,501,000	RM
B	GAJI dan TUNJANGAN PPPK			111,690,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.062-Ternate) - Gaji Pokok PPPK / Gaji ke 13 / Gaji ke 14	1.0 THN	40,023,200	40,023,000 40,023,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.062-Ternate) - Pembulatan Gaji PPPK / Gaji ke 13 / Gaji ke 14	1.0 THN	6,000	6,000	RM
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.062-Ternate) - Tunjangan Suami/Istri PPPK / Gaji ke 13 / Gaji ke 14	1.0 THN	1,000	1,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,684,228,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.062-Ternate) - Tunjangan Anak PPPK / Gaji ke 13 / Gaji ke 14	1.0 THN	1,000	1,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.062-Ternate) - Tunjangan Fungsional PPPK / Gaji ke 13 / Gaji ke 14	1.0 THN	100,000	100,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.062-Ternate) - Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	1,014,000	1,014,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.062-Ternate) - Uang Makan PPPK	1.0 THN	9,240,000	9,240,000	RM
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.062-Ternate) - Tunjangan Umum PPPK / Gaji ke 13 / gaji ke 14	1.0 THN	2,160,000	2,160,000	RM
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.062-Ternate) - Uang Lembur PPPK	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	RM
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.062-Ternate) - Tunjangan Khusus/Kinerja PPPK	1.0 THN	49,145,000	49,145,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,108,151,000	
A	OPERASIONAL PERKANTORAN			911,723,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.062-Ternate) - Langganan Internet - Air Galon - Honor Pramu Bakti Tenaga Kontrak [13 ORG x 13 BLN] - Gas Stasiun KIPM Ternate - Langganan Koran	12.0 BLN 1.0 THN 169.0 OB 12.0 BLN 12.0 BLN	8,000,000 2,111,000 3,200,000 245,000 140,000	96,000,000 2,111,000 540,800,000 2,940,000 1,680,000	RM
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.062-Ternate) - Penambah Daya Tahan Tubuh (Maluku Utara) [6 ORG x 18 HR x 12 BLN]	1296.0 OH	18,000	23,328,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.062-Ternate) - Biaya Pengiriman Surat Dinas Pos	1.0 THN	3,500,000	3,500,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,684,228,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.062-Ternate) > PENGELOLA ANGGARAN > PENGELOLA PNB - Honorarium Bendahara Penerimaan PNB > HONORARIUM PENGELOLA SAI - Penanggungjawab - Koordinator - Anggota [3 ORG x 12 BLN] >> PENGELOLA ANGGARAN - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM - Honorarium Bendahara Pengeluaran - Honorarium Staf Pengelola [6 ORG x 12 BLN] > PEJABAT PENGADAAN BJ, PEJABAT PENERIMA BJ, PENYIMPAN PENGURUS BMN - Honorarium Pengurus Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]	12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 36.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 24.0 OB	200,000 200,000 200,000 150,000 1,370,000 530,000 470,000 350,000 240,000	72,000,000 0 2,400,000 2,400,000 63,840,000 2,400,000 2,400,000 5,400,000 0 16,440,000 6,360,000 5,640,000 25,200,000 5,760,000 5,760,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.062-Ternate) - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Maluku Utara) - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Maluku Utara)	12.0 STEL 26.0 STEL	700,000 700,000	8,400,000 18,200,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.062-Ternate) - Snack Rapat Biasa MALUKU UTARA [30 Orang x 5 kali]	150.0 OK	26,000	3,900,000 3,900,000	RM
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.062-Ternate) - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12.0 OB	272,000	3,264,000 3,264,000	RM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.062-Ternate) - - Listrik Stasiun KIPM Ternate dan Lab	12.0 BLN	10,000,000	120,000,000 120,000,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.062-Ternate) - - Telepon Stasiun KIPM Ternate	12.0 BLN	300,000	3,600,000 3,600,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.062-Ternate) - - Air Stasiun KIPM Ternate dan Lab	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000 12,000,000	RM
B	SARANA PERKANTORAN			10,000,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.062-Ternate) - Pemeliharaan Gedung Kantor UPT	40.0 M2	250,000	10,000,000 10,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,684,228,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			89,500,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.062-Ternate)			30,000,000	RM
	- Jamuan Tamu	1.0 THN	30,000,000	30,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.062-Ternate)			11,500,000	RM
	- Retribusi Sampah Tahunan	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
	- Pas Kendaraan/Petugas Lingkup Bandara	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.062-Ternate)			48,000,000	RM
	- Keperluan Seharihari Perkantoran UPT	12.0 BLN	4,000,000	48,000,000	
D	OPERASIONAL PENGAWASAN			96,928,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.062-Ternate)			4,320,000	RM
	- Biaya Perpanjangan STNK Roda4	2.0 UNIT	1,600,000	3,200,000	
	- Biaya Perpanjangan SNTK Roda2	7.0 UNIT	160,000	1,120,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.062-Ternate)			92,608,000	RM
	- Printer	13.0 UNIT	200,000	2,600,000	
	- pemeliharaan AC [15 Unit x 2 Kali]	30.0 UNIT	150,000	4,500,000	
	- Pemeliharaan Personal Computer/notebook/laptop	15.0 UNIT	200,000	3,000,000	
	- Pemeliharaan Genset	1.0 THN	3,500,000	3,500,000	
	- Bahan Bakar Genset	4.0 UNIT	250,000	1,000,000	
	- Perbaikan inventaris kantor	1.0 THN	2,408,000	2,408,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Maluku Utara)	2.0 UNIT	28,000,000	56,000,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Maluku Utara)	7.0 UNIT	2,800,000	19,600,000	
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	2.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		95,580,000	
	Lokasi : KOTA TERNATE				
3987.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		66,348,000	
051	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			66,348,000	U
A	PROGRAM DAN ANGGARAN			48,085,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.062-Ternate)			535,000	RM
	- Komputer Suplies	1.0 PKT	235,000	235,000	
	- ATK	1.0 PKT	300,000	300,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 UNIT KERJA (649767) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 ALOKASI Rp. 2,684,228,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.062-Ternate) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [4 org x 3 hari] - Uang Harian Perjalanan Rapat Koordinasi Rapat Teknis [4 org x 4 hari] - Transportasi Perjalanan Rapat Koordinasi Rapat Teknis [4 org x 2 kali]	12.0 OH 16.0 OK 8.0 OK	845,000 530,000 4,133,750	47,550,000 6,000,000 8,480,000 33,070,000	RM
B	EVALUASI PERIODE IKU DAN LKJ			413,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.062-Ternate) - ATK - Komputer Supplies	1.0 PKT 1.0 PKT	213,000 200,000	213,000 200,000	RM
C	PENYAJIAN LAPORAN AKIP (LAKIP) DAN LAPORAN TAHUNAN			1,250,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.062-Ternate) - ATK - Komputer Supplies - Penggandaan laporan	1.0 pkt 1.0 PKT 1.0 PKT	350,000 300,000 600,000	1,250,000 350,000 300,000 600,000	RM
D	LAYANAN PENGADUAN			1,600,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.062-Ternate) - ATK - Komputer Supplies	4.0 PKT 4.0 PKT	200,000 200,000	1,600,000 800,000 800,000	RM
E	KOORDINASI DAN KONSULTASI			15,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate) - Hotel Perjalanan Kordinasi komunikasi dan konsultasi (K3) [5 org x 2 hari] - Uang Harian Perjalanan Kordinasi komunikasi dan konsultasi (K3) [5 org x 3 hari] - Transportasi Perjalanan Kordinasi komunikasi dan konsultasi (K3) [5 org x 2 kali]	10.0 OK 15.0 OK 10.0 OK	500,000 430,000 355,000	15,000,000 5,000,000 6,450,000 3,550,000	RM
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		29,232,000	
051	Layanan Manajemen Keuangan			29,232,000	U
A	LAYANAN KEUANGAN DAN UMUM			29,232,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.062-Ternate) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 org x 4 hari] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 org x 5 hari] - Transportasi Sinkronisasi Data SAKTI GLP dengan Eselon 1 [2 Orang x 2 kali]	8.0 OH 10.0 OH 4.0 OK	730,000 530,000 4,773,000	29,232,000 5,840,000 4,300,000 19,092,000	A PNP

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Ternate, 6 Januari 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
 STASIUN KARANTINA IKAN
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 TERNATE
 ARSAL, S.St.Pi, M.P
 NIP. 198105202003121005